

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan dari penulis yang berupa pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB I, BAB II dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Studi kasus PT. Asabri) adalah dalam pelaksanaan kewenangan, Kepolisian dalam praktiknya penyidikan mendasarkan juga dengan Keputusan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disatu sisi Kejaksaan dalam pelaksanaan kewenangan, mendasarkan juga dengan Perja-039/A/JA/10/2010. Kepolisian dan Kejaksaan adalah merupakan institusi yang berbeda namun sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi maka terdapat pembagaian kewenangan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut, dimana apabila menyakut kerugian negara di bawah Rp. 1.000.000.000,00 kewenangan Kepolisian, akan tetapi apabila paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 merupakan kewenangan Kejaksaan.

2. Kebijakan formulasi yang mengatur Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah formulasi kedepan harus dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi, gelar perkara dengan lembaga lainnya khususnya dalam menangani tindak pidana khusus dan memberikan batasan-batasan kewenangan yang nilai kerugiannya di bawah Rp. 1.000.000.000,00 merupakan kewenangan Kepolisian dan apabila paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 maka merupakan kewenangan Kejaksaan, tujuannya adalah agar mengetahui batasan masing-masing kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan tidak terjadi benturan atau tumpang tindih dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

B. SARAN

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penulis menyampaikan saran yang dapat menjadikan masukan bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan lebih ditingkatkan lagi untuk melakukan penyidikan tindak pidana, khususnya penyidikan tindak pidana korupsi dengan diperlukannya koordinasi dan kerjasama antara Kejaksaan dan

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, sehingga pelaksanaan kewenangan penyidikan tercipta penanganan yang optimal, jujur, adil dan bersih dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Peraturan Perundang-undangan diubah agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum, namun hal ini dimungkinkan terjadi apabila bangsa Indonesia mampu dipandang benar-benar menekan dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan membaiknya indeks persepsi korupsi. Perlu dilakukan kerjasama, koordinasi dan gelar perkara antara Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan KPK sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta berkomitmen lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas atau memaksimalkan komitmen pada MOU (*Memorandum Of Understanding*), sehingga tidak terjadi penyimpangan dan benturan dalam kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Indriyanto Seno Adji. *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2001
- IGM. Nurdjana. Korupsi dalam praktik bisnis. *Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi, Penanggulangan Masalah Korupsi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2005
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk membasmi*. Jakarta, Agustus 2006
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Hak Asasi Manusia Dalam Sistem*

Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (lembaga kriminologi). 2007

O. C. Kaligis. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. P.T alumni, Bandung. 2006

Sadjijono. *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. LaksBang PRESS indo Yogyakarta.

Prof. Dr. Syed Husein Alatas. *Bentuk-bentuk korupsi* . Jakarta 1987

Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

W.J.S., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1976

Website :

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, Diunduh pada hari Minggu tanggal 28 September 2014

<http://kepolisian.co.id> Diunduh pada hari Minggu, 28 tanggal September 2014

http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=7, Diunduh pada hari Minggu, tanggal 28 September 2014

Tesis :

Salahuddin Lutfie. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Tesis.Universitas Indonesia. 2011

Perturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)